

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemikiran politik yang ditawarkan oleh Karl Raimund Popper perihal masyarakat terbuka. Konsep politik yang ditawarkannya itu kemudian ditinjau relevansinya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan terlebih dahulu mengetahui metodologi yang digunakan, bagaimana sistematika penulisannya, apa kegunaannya, dan juga latar belakangnya. Oleh karena itu, pada bagian pertama ini terdapat ulasan mengenai apa yang menjadi latar belakang, tujuan, kegunaan, sistematika, serta metode yang digunakan dalam penulisan ini.

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek yang dimiliki manusia dan yang menjadi kekhasannya yakni keberadaannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan pihak lain.¹ Tanpa kehadiran orang lain, manusia tidak ada. Fakta sosial pertama yang dimiliki oleh manusia ialah peristiwa kelahiran. Manusia dilahirkan oleh orang lain, yakni ibunya. Semua manusia, baik yang pernah ada, yang kini ada, maupun yang akan ada, tidak dapat melahirkan dirinya sendiri.

Sesudah kelahiran, manusia juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Ia membutuhkan pihak lain sebagai rekannya. Lahirlah masyarakat sebagai jawaban bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang unik. Masyarakat terbentuk sebagai jawaban akan kebutuhan sosial dari manusia sebagai individu. Di dalam masyarakat terdapat keberagaman berupa struktur kepemimpinan serta pembagian profesi. Demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan, masyarakat membentuk

¹ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 28.

sistem kepemimpinan dan pembagian kerja.² Masyarakat mengakui adanya fakta keberagaman.

Namun, dalam realitas, fakta keberagaman sering diganggu oleh tindakan penyeragaman. Bentuk penyeragaman itu ialah kontrol sepihak oleh mereka yang berkuasa. Pengontrolan bukanlah suatu hal yang keliru atau salah. Pengontrolan itu sendiri esensinya merupakan sesuatu yang baik, yakni demi menciptakan ketertiban. Pengontrolan akan menjadi sesuatu yang salah bahkan berbahaya apabila bersifat absolut. Artinya semua hal dikontrol secara total agar sesuai dengan keinginan dari pihak yang berkuasa. Pengontrolan yang total merupakan suatu bentuk penindasan terhadap kebebasan warga negara.

Sistem pemerintahan yang melakukan kontrol absolut terhadap kebebasan warga merupakan pemerintahan yang bersifat otoriter. Otoritarianisme bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia pemerintahan. Berdasarkan ulasan yang dicetuskan oleh Karl Raimund Popper, pemerintahan yang bersifat otoriter telah hadir pada masa pemerintahan Yunani.

Popper dalam bukunya *Open Society and It's Enemies*, memberikan bukti bahwa pemerintahan otoriter itu hadir pada pemerintahan di Sparta. Praktik *eugenia* (praktik untuk menyeleksi bayi yang baru dilahirkan) dijalankan pada masa itu, bayi yang dinilai tidak unggul dibinasakan. Dalam dunia pendidikan pula otoriter hadir. Pendidikan disesuaikan dengan keadaan dari para murid, apakah ia seorang raja, tentara, ataukah buruh. Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas.³

Pemerintahan yang totaliter juga terjadi pada zaman modern yang diwakili oleh rezim totaliter Hitler. Praktik totaliter yang dijalankan oleh Hitler didorong oleh suatu dogma bahwasanya ras Arya merupakan ras unggul sehingga ras lain perlu untuk dibasmi.⁴

² Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 157.

³ Karl Raimund Popper, *Open Society and It's Enemies* (New York: Routledge, 1966), hlm. 88.

⁴ E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 77.

Praktik totaliter juga pernah terjadi di Indonesia sendiri di bawah pimpinan Soeharto. Pemerintahan totaliter yang dijalankan tersebut sebenarnya dipicu oleh suatu tujuan akhir yang ingin dicapai yakni kestabilan ekonomi.

Sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia pada era Jokowi juga mempraktikkan bentuk pemerintahan yang otoriter. Jokowi yang juga merupakan sosok berkarismatik pernah melakukan kekeliruan dalam menjalani kepemimpinannya. Ia sendiri dinilai sebagai sosok yang kejam, bahkan pembunuh. Terjadi beberapa kasus penyelewengan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Jokowi sendiri. Ia mengizinkan praktik hukuman mati.⁵ Penyelewengan lain dalam kebijakan politik dewasa ini ialah kebijakan Undang-Undang ITE. Melalui kebijakan tersebut, negara secara legal mengekang kebebasan dalam menyampaikan pendapat dari masyarakat. Hal inilah yang memprakarsai adanya praktik otoriter yang dijalani oleh Jokowi.

Sistem yang otoriter bukan sistem pemerintahan yang baik. Tujuan-tujuan kolektif dan politik tidak perlu ditempuh melalui pengontrolan yang total, melainkan perbaikan. Hal ini pula telah dibicarakan oleh Popper dalam bukunya *Open Society and Its Enemies*. Dalam *opus magnum*-nya itu, Popper menawarkan konsep tentang masyarakat terbuka. Menurut Popper, masyarakat terbuka adalah masyarakat yang mencapai tujuan-tujuan bersama tidak melalui pengontrolan yang total serta kekejaman melainkan melalui perbaikan yang sedikit demi sedikit. Masyarakat terbuka menolak sistem otoriter, menolak totaliter dan menerima sistem demokrasi yang mengakomodasi kritik.⁶

Gagasan masyarakat terbuka merupakan kritik Popper terhadap masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup adalah masyarakat yang diatur oleh mekanisme pemerintahan

⁵ Keen Achroni, *Jokowi Memimpin Dengan Hati* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 129.

⁶ Karl Raimund Popper, *Unended Quest: A Remarkable Document of Intellectual History* (London and New York: Routledge, 1986), hlm. 112-113.

totaliter. Dalam sejarah pemerintahan klasik, Popper mengidentifikasi masyarakat Sparta sebagai bentuk masyarakat tertutup. Dalam masyarakat tertutup Sparta, terjadi pengontrolan total. Kestabilan sangat ditekankan dalam masyarakat tertutup. Popper sendiri menggambarkan masyarakat tertutup sebagai masyarakat organik, masyarakat yang mempunyai pembagian peranan dengan sangat kaku, layaknya organisme dalam tubuh. Pembagian demikian menjadikan setiap orang terpaku pada tugasnya, sehingga tidak terjadi dinamika dalam peran sosial dan politik individu dalam masyarakat.⁷

Konsep masyarakat terbuka yang dicetuskan oleh Popper juga merupakan hasil evaluasi dan kritiknya terhadap Plato, Hegel, dan juga Marx yang didasari pada epistemologi falsibilitasnya. Epistemologi Popper dikenal sebagai epistemologi *problem solving*. Dalam epistemologinya ini ia menolak penerimaan kebenaran yang bersifat kekal.⁸ Popper sangat menekankan kemungkinan untuk salah dari setiap hipotesis yang ditawarkan. Ia sendiri tidak mengakui adanya kebenaran yang final, ia menolak dogmatisme. Kebenaran hanyalah sementara sejauh belum ada hipotesis lain yang menggugurkannya.

Buku *Open Society and It's Enemies* terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari buku ini mengulas pemikiran Plato, serta kritik Popper atas pemikiran Plato. Bagian kedua memuat kritik atas pemikiran Hegel dan Marx. Bagi Popper, ide-ide yang ditawarkan oleh Plato, seperti ide tentang keadilan, dan juga program politik Plato untuk menghentikan perubahan, menjadikan pemikiran Plato bersifat totaliter.⁹

Pemikiran Karl Marx dan Hegel, dalam pandangan Popper juga bersifat totaliter. Penilaian ini timbul dari analisis yang dilakukan Popper sendiri terhadap ide-ide yang ditawarkan oleh keduanya. Konsep negara sebagai perwujudan Roh Absolut dan sintesis

⁷ Popper, *Open Society and It's Enemies*, **Op. Cit.**, hlm. 179.

⁸ A . Setyo Wibowo, (ed.), *Cara Kerja Ilmu Filsafat Dan Filsafat Ilmu* (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm. 186.

⁹ Popper, *Open Society and It's Enemies*, **Op. Cit.**, hlm 18.

dialektika dari Hegel dinilai oleh Popper sebagai pemikiran yang totaliter. Pada Marx, konsep yang mendapat kritik dari Popper yakni materialisme historis dan masyarakat kelas.

Bertolak dari kritik-kritik yang dilontarkan oleh Popper bagi ketiga tokoh yang dikenal mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia filsafat serta epistemologinya, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh konsep yang ditawarkan oleh Popper. Untuk menggapai tujuan itu, penulisan ini diberi judul, “***Konsep Masyarakat Terbuka menurut Karl Raimund Popper dan Relevansinya di Indonesia***”.

1.2. Rumusan Masalah

Pertama, tulisan ini menjelaskan konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Karl Popper. Masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper ialah suatu komunitas yang memiliki keterbukaan terhadap kritik. Kritik menjadi sarana untuk mengontrol sistem pemerintahan yang sedang berkuasa. Konsepnya itu menjadi titik tolak dalam pembahasan ini. Untuk dapat memahami konsepnya secara baik, rumusan pertanyaan yang diajukan ialah bagaimana pandangan Popper tentang masyarakat terbuka?

Kedua, poin penting yang dikaji dalam tulisan ini ialah tentang demokrasi di Indonesia. Di dalamnya terdapat kajian tentang sejarah dan ketimpangan yang terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Poin ini dikaji oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan bagaimana perkembangan sistem demokrasi di Indonesia?

Ketiga, penulisan ini berusaha untuk mengkaji sumbangan pemikiran Popper tentang masyarakat terbuka bagi demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami ketimpangan, ditinjau dalam kajian konsep masyarakat terbuka menurut Popper. Persoalan ini dijelaskan oleh penulis dengan mengajukan bagaimana relevansi konsep masyarakat terbuka menurut Popper bagi sistem demokrasi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa sasaran yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain;

Pertama, inventarisasi. Karya-karya yang dimiliki Popper dipelajari dengan sejelasa dan setepat mungkin. Pengarang lain yang menulis tentangnya juga dikumpulkan dalam dalam penelitian ini. Pemikiran Popper maupun ulasan tentangnya yang tersebar dalam buku maupun jurnal dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk memahami pemikiran yang digagaskan oleh Popper.

Kedua, sintesis. Penelitian ini merupakan suatu sintesis dari pencarian yang diadakan peneliti atas pemikiran Popper tentang masyarakat terbuka serta sumbangan dari pemikiran Popper bagi demokrasi di Indonesia. Pemikiran Popper baik di bidang ilmu pengetahuan maupun bidang politik, dalam penelitian ini ditemukan sintesisnya.

Ketiga, pemahaman baru. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman baru perihal konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan Popper. Pemahaman baru itu dihasilkan dengan menghubungkan pemikiran Popper tentang masyarakat terbuka dengan situasi demokrasi di Indonesia.

Keempat, evaluasi kritis. Tujuan lain yang terdapat dalam penelitian ini ialah memberikan kritik berkaitan dengan konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan Popper. Masyarakat terbuka yang ditawarkan Popper oleh penulis ditemukan adanya kekurangan yang perlu untuk dibenahi.

1.4. Kegunaan Penulisan

Pertama, bagi Civitas Akademika Universitas Widya Mandira Kupang. Tulisan ini memberikan sumbangsi bagi semua Civitas Akademika Widya Mandira Kupang, mengenai konsep yang ditawarkan oleh Karl Raimund Popper. Selain itu melalui tulisan ini

mendorong Civitas Akademika Widya Mandira Kupang untuk mampu berpikir kritis dan ilmiah sebagaimana yang digagaskan oleh Karl Raimund Popper.

Kedua, bagi filsafat sebagai ilmu. Kontribusi dari penelitian ini juga ditujukan bagi filsafat sebagai ilmu. Epistemologi yang ditawarkan oleh Popper memberikan sumbangan bagi pertumbuhan filsafat sebagai ilmu. Pertumbuhan itu dapat dicapai melalui keterbukaan terhadap kritik.

Ketiga, bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merekonstruksi konsep masyarakat Indonesia sebagai kekuatan kontrol dalam demokrasi. Warga masyarakat bukanlah objek melainkan subjek politik yang berani mengajukan kritik terhadap ketidakberesan pemerintah.

Keempat, bagi jajaran pemerintahan. Tulisan ini memberikan sumbangan kepada pemerintah yang berkuasa untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap kritik. Pemerintah disadarkan bahwa apa yang mereka putuskan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, sehingga mereka perlu memiliki adanya sikap yang terbuka terhadap kritik.

Kelima, bagi penulis. Melalui pendalaman akan konsep yang ditawarkan dalam tulisan ini, penulis diperkaya dengan konsep-konsep Popper. Tulisan ini juga membangkitkan sikap kritis dan sikap ilmiah dari penulis sendiri.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terdiri dari 5 bagian, yakni bab I, II, III, IV, dan V. Pada bab I, menguraikan perihal latar belakang, kegunaan, tujuan dari penulisan ini. Pada bab II, terdapat penguraian sistematis tentang beberapa pokok pemikiran Popper yang disertai dengan latar belakang baik intelektual maupun politis. Bab III, berisi perihal konsepsi yang ditawarkan oleh Popper dalam dunia politik, yakni masyarakat terbuka. Bab IV, memuat

ulasan tentang relevansi konsep masyarakat terbuka dari Popper bagi demokrasi di Indonesia. Penjelasan ini didahului dengan pengertian tentang demokrasi, periodisasi demokrasi di Indonesia, serta ketimpangan demokrasi di Indonesia. Bagian selanjutnya berisi sumbangsi ide Popper tentang masyarakat terbuka bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi memberikan penuntun bagi peneliti untuk dapat memecahkan masalah pokok penelitian. Menyadari betapa pentingnya metodologi, penelitian ini pun juga menggunakan beberapa metodologi yang dinilai membantu terealisasinya tujuan dari penelitian ini. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, interpretasi. Penulisan ini juga menggunakan metode interpretasi. Penulis melakukan interpretasi terhadap pemikiran Popper bertolak dari sumber-sumber yang diperoleh, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Interpretasi dilakukan secara objektif dengan turut serta memperhatikan konteks sosial yang dialami oleh Popper sendiri. Konteks dan pemikiran mempunyai korelasi timbal balik yang tidak dapat dilepaspisahkan.

Kedua, induksi dan deduksi. Kedua metode pemikiran ini juga digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Popper ditinjau baik dengan cara deduksi maupun induksi oleh penulis. Karya-karya tokoh dipelajari dengan membuat analisis atasnya satu persatu dan dalam hubungannya dengan yang lain (induksi), juga untuk memahami lebih baik pemikiran Popper dilakukan metode deduksi dengan melihat secara detail konsep yang ditawarkannya.

Ketiga, koherensi internal. Penggunaan metode ini oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara melihat kesatuan cara berpikir dari Popper sendiri. Berbagai konsep yang

ditawarkan oleh Popper diteliti untuk menemukan kesatuan di dalamnya. Ditetapkan adanya pikiran pokok kemudian ditinjau susunan logis dalam pengembangan pemikirannya.

Keempat, holistika. Untuk dapat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam tulisan ini, penulis juga meneliti secara holistik konsep yang ditawarkan oleh Popper. Konsep pemikiran Popper dilihat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan juga politik.

Kelima, kesinambungan historis. Pemikiran Popper dalam tulisan ini tidak hanya sebatas teoretis belaka. Penulis juga melihat latar belakang historis yang turut mempengaruhi konsep yang dihasilkan oleh Popper sendiri. Sebagai latar belakang eksternal diteliti keadaan sosial politik, ekonomi, budaya, yang terjadi pada zaman kehidupan Popper, sedangkan latar belakang internal diteliti perihal minat filsafat yang digelutinya serta proses perkembangan pemikirannya.

Keenam, idealisasi. Penggunaan metode idealisasi dalam tulisan ini, digunakan oleh penulis dengan merumuskan secara memadai konsep yang ditawarkan oleh Popper mengenai masyarakat terbuka untuk dapat menghasilkan pemahaman yang utuh.

Ketujuh, heuristika. Kekhasan dari heuristika ialah adanya pemahaman yang baru bertolak dari pemikiran yang sudah ada. Dalam tulisan ini, bertolak dari pemikiran yang ditawarkan oleh Popper, penulis berusaha untuk menemukan suatu pemahaman baru, yang dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan saat ini.

Kedelapan, deskripsi. Penulis berusaha sebisa mungkin untuk dapat menjelaskan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Popper, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang kompleks atasnya serta mampu untuk mendeskripsikannya.